

V. KESIMPULAN DAN SARAN

1.1. Kesimpulan

Secara umum RSUD Sungai Dareh umumnya dan bagian Instalasi Gawat Darurat khususnya sudah menerapkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik pada masyarakat yang berobat ke rumah sakit. Ada beberapa indikator yang bisa kita lihat bahwa RSUD Sungai Dareh telah menerapkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik kepada masyarakat.

Penerapan transparansi dalam pelayanan publik bisa dilihat dari keterbukaan proses penyelenggaraan pelayanan publik, di mana Di RSUD Sungai Dareh, khususnya di IGD sudah ada standar operational procedural (SOP) yang mengatur bagaimana pelayanan yang akan diberikan kepada pasien, dalam SOP itu juga dicantumkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pasien/keluarga pasien kalau berobat melalui IGD. Transparansi juga bisa dilihat dari mudahnya masyarakat dalam mengakses peraturan dan prosedur pelayanan yang diberikan oleh pihak RSUD, baik melalui papan informasi, leaflet, brosur, website dan juga website Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya. Indikator transparansi lain yang bisa dilihat dari kemudahan masyarakat dalam memperoleh informasi, yaitu ke bagian Humas RSUD Sungai Dareh.

Penerapan akuntabilitas dalam pelayanan publik bisa dilihat dari beberapa indikator, di antaranya RSUD Sungai Dareh sudah memiliki visi dan misi, sudah memiliki job description, sudah ada LAKIP dan laporan keuangan serta ada

panitia khusus yang dibentuk untuk penanganan pengaduan keluhan masyarakat atas pelayanan yang diberikan di rumah sakit.

Walaupun RSUD Sungai Dareh telah menerapkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik, akan tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat keluhan dan kritikan dari masyarakat, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu kurangnya petugas yang memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama tenaga dokter spesialis, kurangnya sarana dan prasarana rumah sakit, terbatasnya sarana kesehatan yang dimiliki oleh rumah sakit serta tidak adanya regulasi khusus yang mengatur penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik, misal perda khusus yang mengatur transparansi dan akuntabilitas tersebut.

5.2. Saran

Ada beberapa saran yaitu :

- a. Perlu adanya aturan/regulasi/ perda yang mengatur secara khusus penerapan transparansi dan akuntabilitas pelayanan di rumah sakit umum daerah.
- b. Perlu adanya petugas khusus yang memberikan informasi mengenai prosedur pelayanan dan pengobatan di rumah sakit umum daerah
- c. Perlu adanya penambahan kapasitas, kualitas dan kuantitas petugas rumah sakit, khususnya tenaga dokter spesialis dan penambahan sarana dan prasarana alat-alat kesehatan

- d. Perlu diadakannya sosialisasi ke masyarakat nagari-nagari yang melibatkan tokoh-tokoh masyarakat di nagari mengenai prosedur pelayanan dan pengobatan di RSUD Sungai Dareh.
- e. Perlu adanya penelitian lebih lanjut yang dilakukan oleh pemerintah daerah mengenai pengembangan daerah di bidang kesehatan



DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. 1996. *Prosedur Penelitian*. Bandung : Rineka Cipta
- Adrianto, Nico. 2007. *Good Governance :Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui e-Government*. Palangkaraya : Bayu Medis.
- Arikunto, S. 2006. *Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Edisi Revisi VI. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Bungin, Burhan. 2003. *Analisa Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Dwiyanto, Agus. 2001. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan. Yogyakarta : UGM.
- _____. 2006. *Mewujudkan Good Governnace Melayani Publik*. Yogyakarta : Gajah Mada University.
- Dwiyanto.blogspot.co.id/2011/10/masalah mendasar pelayanan kesehatan
- Dokumen Rencana Strategis (Renstra) RSUD Sungai Dareh 2011-2015 Kabupaten Dharmasraya.
- Effendi, Sofian. 2005. *Membangun Budaya Birokrasi Untuk Good Governance, Makalah Seminar Lokakarya Nasional Reformasi Birokrasi*. Jakarta : Kantor Menteri Negara PAN. 22 September 2005
- Firnas, Adian Muhamad, ” Implementasi *Good Governance* Melalui Reformasi Sistem Kepegawaian : Belajar dari Pengalaman China”, *Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS, Vol I*
- Garini, Nadia. 2011. *Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap KinerjaInstansi Pemerintah Pada Dinas di Kota Bandung*. Skripsi. Bandung: FE UNIKOM
- Kamal, Miko. 2001. “Mekanisme Konsultasi Publik, Pembuatan Perda dan Good Governance” dalam *Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah*, ed Saldi Isra dan Suharizal. Padang : Anggrek Law Firm bekerjasama dengan Pemda Pasaman.
- Karhi, Nisjar S. 1997. *Beberapa Catatan Tentang “Good Governance”*, Jurnal Administrasi Dan Pembangunan, Vol.1 No.2.

Krina P. 2003. *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*. Jakarta : Sekretariat Good Publik Governance BAPENAS

Lembaga Administrasi Negara. 2000. *Akuntabilitas dan Good Governance, Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)*: Jakarta.

LAN dan BPKP. 2000. *Akuntabilitas dan Good Governance*. Jakarta : LAN

2003. *Pedoman Penyusunan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Jakarta : LAN

Mulyana, Deddy, cet. 2. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Mardalis. 1999. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta : Bumi Aksara.

Moleong J, Lexy. 1991. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosda Karya.

Nugroho, D Riant. 2003. *Kebijakan Publik; Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Osborne, David dan Gabler, Ted. 2005. *Mewirauahakan Birokrasi (reinventing Government) : Mentranformasikan Semangat Wirauahaha ke Dalam Sektor Publik*. Jakarta : Penerbit PPM

Permana, 2002. *Kinerja Organsasi Publik (Studi Kasus Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Purwakarta)*. Yogyakarta : MAP Univeritas Gadja Mada.

Rodinelli, dkk. 1983. *Decentralization and Development : Policy Inplementation in Developing Countries*. London : Sage Publication dikutip dalam Aidinil Zetra, dkk. 2007. Kajian Penerapan Manajemen Kerja Dalam Mewujudkan Pelayanan Prima di Propinsi Sumatera Barat. Padang : Kerjasama Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Propinsi Sumatera Barat dengan Lembaga Peneliiian Universitas Andalas.

Rosyidi, Bakaruddin. 2003. "Good Governance dan Capacity Building dalam Membangun Sistem Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat", *Jurnal Analisa Politik*, Vol 1, No 5. FISIP Unand Padang.

Sugiyono. 2005. *Metode penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.

- Sumarto, SJ Hatifah SJ. 2004. *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*, Jakarta: YOI.
- Supriadi, dkk. 2014. *Analisis Pengaruh Sistem engendalian Internal, Organizational Citizenship behaviour dan Good Governance Terhadap Kinerja Organisasi Berdasarkan Perspektif Balanced Scorecard*. E-journal S1 Ak Univeristas Pendidikan Ganesha. Vol. 2 (Tahun 2014). No. 1.
- Soehartono, Irawan.1999. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Santoso, Purwo (ed), dkk. 2004. *Menembus Ortodoksi Kajian Kebijakan Publik*, Yogyakarta: FISIPOL UGM.
- Suharto, Edi. 2008. *Kajian Penerapan Pelayanan Khusus(Service For Customers With Special Needs) pada Sektor Pelayanan Publik*. Lembaga Administrasi Negara. Disampaikan pada Focused Group Discussion (FGD).Bogor, 9-10 Oktober 2008.
- Sudarmayanti. 2003. *Good Governace (Kepemerintahan Yang Baik)*.Bagian Kedua.Bandung : Mandar Maju.
- Husaini Usman, Purnomo, S.A, 1996. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Tangkilisan,dkk.2003. *Kebijakan Publik Yang Membumi*.Yogyakarta : Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 2000. *Good Governance:Paradigma Baru Manajemen Pembangunan*. Jakarta :UI Pres
- Widodo, Joko. 2001.*Good Governance : Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Surabaya:Insan Cendekia.
- _____. 2011. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik)*. Malang : Bayumedia.
- Widodo, Erna dan Muchtar.2000.*Konstruksi ke Arah Penelitian Deskriptif*. Jakarta : Avyroz.
- SA, Purnomo dan Usman, Husaini Usman. 1996. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta : Bumi Aksara

Wijaya, Fefta Andy. *Akuntabilitas Aparatur Pemerintah Daerah dalam Era Good Governance dan Otonomi Daerah* dalam Jurnal ilmiah Administrasi Publik Vol. VIII No. 2 Maret-Agustus 2007.

Wibawa. 2005. *Peluang Penerapan New Public Management Untuk Kabupaten di Indonesia*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.

Yin K, Robert. 2000. *Studi Kasus Desain dan Metode*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Yudo, Satmoko Komarudin. 2009. *Transparansi dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Kasus Teknologi Pengelolaan Air Bersih dan Air Limbah Domestik*. JAI Vol 5 No.1. 2009

[https://ziyahshiyam.wordpress.com/2013/02/09/Pelayanan Publik Bidang Kesehatan](https://ziyahshiyam.wordpress.com/2013/02/09/Pelayanan-Publik-Bidang-Kesehatan)

<http://www.scribd.com/doc/21745323/Manajemen-Pelayanan-Medik-di-Rs>.

[http://www.hukumonline.com/berita/baca/pelayanan-buruk-19-rumah-sakit Jabodetabek](http://www.hukumonline.com/berita/baca/pelayanan-buruk-19-rumah-sakit-Jabodetabek).

